

# I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Kebakaran hutan merupakan salah satu penyebab utama kerusakan hutan yang dapat mengganggu kelestarian hutan. Dampak kebakaran hutan sendiri sangat besar, baik dari aspek ekologi maupun ekonomi. Pada awal kebakaran hutan dan lahan yang terbesar terjadi pada periode 1997/1998 seluas 10 juta ha. Kebakaran tersebut terjadi menyebar hampir di seluruh Indonesia terutama di Kalimantan dan Sumatera dan menimbulkan kerugian besar terhadap lingkungan yaitu kerugian sumberdaya hutan dan lahan, sosial ekonomi masyarakat, dan kerugian akibat asap kebakaran hutan yang menimbulkan polusi sampai ke negara tetangga Malaysia dan Singapura.

Kebakaran hutan menjadi ancaman potensial bagi upaya pembangunan berkelanjutan. Dari tahun ke tahun kasus kebakaran di Indonesia semakin meningkat. Tercatat pada tahun 2012 terdapat 20.850 titik api (hotspot) kebakaran hutan di Indonesia hanya dalam kurun waktu 9 bulan (januari-september). Angka ini mengalami peningkatan sebesar 26,7% dari tahun 2011 yang mencapai 16.450 titik dalam kurun waktu yang sama. Total 92% kebakaran terjadi di Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi serta 8% terjadi di Jawa dan Bali (Supriyanto *et al.*, 2018).

Luas kebakaran hutan pada tahun 2015 mencapai 19.528 hektar yang terdiri dari 12.307 kawasan hutan dan 7.221 kawasan non hutan. Hal ini berbanding drastis dengan kebakaran hutan yang terjadi tahun 2010 yang hanya 17,50 hektar (Asrini *et al.*, 2015). Kebakaran hutan dan lahan di Jambi belum juga teratasi, mulai Juli dan September 2019 titik api terus meningkat. 23 September 2019, sebagian wilayah Provinsi Jambi mulai diguyuri hujan. Setelah beberapa hari hujan lebat turun, tingkat kebakaran hutan sedikit berkurang. Namun mulai minggu kedua Oktober 2019, kebakaran di beberapa daerah kembali terjadi. Informasi yang beredar di media massa dan elektronik menyatakan bahwa kebakaran hutan dan lahan belum juga mampu ditanggulangi bahkan terus bertambah. Walhi bahkan menyatakan beberapa lahan perusahaan milik konsesi perusahaan HTI maupun HPH yang terbakar pada tahun 2015, kembali mengalami kebakaran pada tahun 2019 ini. Lahan yang terbakar antara lain milik

PT Bahari Gembira Ria (BGR), PT Bara Ekaprima (BEP), PT Putra Duta Indowood (PDI), PT Pesona, PT Kaswaru Unggul (KU), PT Wira Karya Sakti (WKS). Sebagian lahan yang terbakar adalah lahan gambut.

Menurut perkiraan laporan triwulanan perkembangan perekonomian Indonesia, kebakaran dan kabut asap telah mengakibatkan kerusakan dan kerugian yang nilainya berkisar antara Rp 11,8 triliun (857 juta dolar AS) di Jambi hingga Rp 53,7 triliun (3,9 miliar dolar AS) di Sumatera Selatan. Ditinjau dari sudut persentase PDB provinsi, Kalimantan Tengah diperkirakan merupakan provinsi yang paling terdampak sebesar 34 persen setengahnya berasal dari kerugian pertanian, terutama perkebunan kelapa sawit (Laporan Triwulanan Perkembangan Perekonomian Indonesia (IEQ), Bank Dunia, Jakarta, 2015).

Salah satu kejadian kebakaran yang memberikan dampak sangat merugikan yang terjadi pada 2019 menurut WAHANA Lingkungan Hidup (Walhi) membeberkan nilai kerugian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) gambut di Provinsi Jambi mencapai Rp 145 triliun. Nilai kerugian tersebut, dihitung berdasarkan luas lahan gambut terbakar dan rusak seluas 114 ribu hektare yang terjadi dalam kurun waktu tahun 2019. Asumsi kajiannya untuk memulihkan gambut yang rusak akibat terbakar dalam satu hektare dibutuhkan biaya Rp 1,2 miliar. Sehingga jika diakumulasikan dengan luasan gambut rusak itu dibutuhkan biaya yang cukup besar untuk pemulihan dan termasuk dalam aspek kerugian.

Luas kebakaran hutan dan lahan di Jambi pada periode Januari-Agustus 2019 mencapai 18.584 hektar. 8.000 hektar lebih merupakan kebakaran yang terjadi di kawasan gambut. Laporan dari Satgas Karhutla Jambi luas kebakaran hanya 700 hektar (Mongabay, 2019). Walhi mencatat sampai dengan 20 September 2019 telah terjadi kebakaran dengan luas 77.144.04 Ha (Jambione.com, 2019). Penyebab kebakaran hutan dan lahan di Jambi 99,9% akibat aktivitas manusia (Diana, 2014). Kejadian kebakaran hutan dan lahan tahun 2019 dipandang masyarakat sebagai tragedi bencana yang terulang kembali. Bencana yang sama juga pernah terjadi saat kemarau panjang pada tahun 1998.

Kebakaran hutan akan mengakibatkan manfaat-manfaat sumberdaya hutan tersebut menjadi hilang. Hilangnya manfaat sumberdaya hutan ini

mengakibatkan kerugian material yang sangat besar. Oleh karena itu kerugian yang ditimbulkan perlu ditaksir nilai ekonominya. Penaksiran ini bertujuan untuk mengetahui besarnya kerugian kebakaran secara material sehingga dapat ditentukan pertimbangan-pertimbangan untuk tindakan preventifnya.

Kebakaran hutan dan lahan yang tidak terkendali dapat menyebabkan kerugian lingkungan yang sangat besar, baik ditinjau dari aspek ekonomi masyarakat, ekologi, dan politis. Bentuk kerugian tersebut antara lain rusak dan hilangnya sumberdaya hutan dan lahan pertanian dan perkebunan, meningkatnya laju erosi tanah, menurunnya sistem penyangga kehidupan dengan berkurangnya keanekaragaman jenis flora dan fauna sebagai sumber plasma nutfah, berubahnya fungsi hidrologi, perubahan iklim mikro, dan menurunnya nilai estetika.

Kerugian lain yang tidak kalah penting yaitu dampak asap tebal yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan yang berpengaruh terhadap menurunnya produktivitas masyarakat dan aktivitas ekonomi lainnya, dan hubungan kerjasama dengan negara tetangga. Bentuk kerugian dari asap kebakaran dapat ditinjau dari aspek kesehatan, kehilangan produksi industri pertanian dan perkebunan, pariwisata, gangguan transportasi, menurunnya pengunjung hotel dan penginapan serta kemungkinan memburuknya kerjasama diplomasi dengan negara lain

Penentuan metode penilaian ekonomi lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan relatif sulit untuk dilakukan, terutama untuk menilai manfaat ekologi (*intangible*) yang hilang dari sumberdaya hutan dan lahan seperti pengatur tata air, pengendali erosi atau banjir, penyerap karbon, pengendali iklim mikro, keberadaan spesies langka, dan keanekaragaman hayati. Sementara untuk pengukuran manfaat dari sumberdaya hutan dan lahan yang dapat dinilai oleh pasar secara langsung (*tangible*) seperti nilai kayu dan manfaat lain yang dapat dikonsumsi dan mempunyai nilai pasar, relatif lebih mudah dinilai kerugiannya (Yunus, 2005). Kebakaran hutan dan lahan terjadi setiap tahun dengan luas cakupan dan jumlah titik api (*hot spot*) yang bervariasi. Kejadian ini sebenarnya telah diantisipasi, namun tidak berdaya melakukan pencegahan.

Menurut berbagai hasil kajian dan analisis (CIFOR, 2006 dan Walhi, 2006), penyebab kebakaran hutan dan lahan berhubungan langsung dengan perilaku

manusia yang menginginkan percepatan penyiapan lahan (*land clearing*) untuk persiapan penanaman komoditas perkebunan. Para pihak yang berkepentingan ingin segera menyiapkan lahan dengan biaya yang serendah-rendahnya dan sekaligus mengharapkan kenaikan tingkat kemasaman (pH) tanah (dari sekitar 3 sampai 4 menjadi 5 sampai 6) agar 3 tanaman perkebunan (sawit dan akasia, misalnya) dapat tumbuh dengan baik. Juga dilaporkan bahwa perladangan tradisional yang menerapkan sistem usahatani gilir balik tidak dapat disalahkan sepenuhnya karena jumlah wilayah yang terbakar pada lahan-lahan tersebut hanya sekitar 20 persen dari total keseluruhan yang terbakar. Dari jumlah ini, kurang dari separuhnya terjadi pada lahan-lahan pertanian milik masyarakat yang menerapkan rotasi usahatani sementara sisanya pada kawasan bekas konsesi yang ditinggalkan para pemiliknya yang kemudian digunakan oleh masyarakat.

Penilaian ekonomi kerugian kebakaran hutan dan lahan harus dilakukan baik pada sumberdaya hutan nyata atau tidak nyata, karena kerugian yang ditimbulkan bukan hanya dari kayu yang hilang, tetapi seluruh flora fauna yang ada di dalamnya yang terbakar dan keanekaragaman hayati yang musnah sebelum sempat dimanfaatkan oleh manusia.

Namun, sampai saat ini penilaian aspek ekonomi terhadap ekonomi masyarakat kebakaran hutan masih sangat terbatas dan penilaiannya bersifat umum serta sangat bervariasi tergantung metode, waktu, dan lokasi kebakaran hutan dan lahan.

Sehingga penelitian ini difokuskan untuk wilayah sekitar kawasan kebakaran hutan dan lahan, berdasarkan observasi pertama dilakukan dengan wawancara terhadap kepala desa dan penduduk setempat, bahwa luasan kebakaran lahan masyarakat di Desa Sipin Teluk Duren diperkirakan  $\pm$  30 hektar dan di Desa Arang Arang diperkirakan  $\pm$  20 hektar. Dalam penelitian ini difokuskan untuk melakukan analisis ekonomi masyarakat terhadap dampak kebakaran hutan dan lahan pada sektor ekonomi pertanian dan perkebunan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Berapa besar penerimaan usaha tani pada sektor perkebunan dan pertanian pada area bekas kebakaran hutan dan lahan.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui berapa besar penerimaan usaha tani pada area bekas kebakaran hutan dan lahan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi berapa besar penerimaan ekonomi masyarakat pada area bekas kebakaran hutan dan lahan.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bagi masyarakat, pemerintah dan para pelaku usaha kehutanan pelaku usaha mengenai ekonomi masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan agar dapat digunakan sebagai sumber referensi dan informasi yang dapat berguna bagi peneliti selanjutnya.